



Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah

Fajar Dimas Nur Islam¹, Galang Vergiawan², Fedro Hans Nobuala Zaluchu³

^{1,2,3}Politeknik Imigrasi, Indonesia

E-mail: fajardimasnurislam.fdni@gmail.com, galangvergiawan29@gmail.com, fedrohansz@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-12-03 Revised: 2023-01-15 Published: 2024-02-06	Efforts to combat human trafficking in Indonesia are the main focus on evaluating government policies and performance in fighting this form of crime. Human trafficking is a serious problem involving the exploitation of individuals, especially women and children, for commercial purposes such as prostitution, forced labor, and sexual exploitation. The Indonesian government has adopted various policies and programs to address human trafficking, but their effectiveness needs to be critically evaluated. This journal includes an in-depth analysis of policy developments and steps taken by the Indonesian government in efforts to combat human trafficking. This research also examines the government's performance in implementing this policy, covering aspects of law enforcement, victim protection, rehabilitation and international cooperation. The findings in this journal have important implications for improving government policies and actions in combating human trafficking in Indonesia. In conclusion, efforts to combat human trafficking require strong cooperation between governments, community institutions and international parties to achieve better results in protecting human rights and ending this cruel practice.
Keywords: <i>Crime;</i> <i>Trafficking;</i> <i>Government's Performance;</i> <i>Policy;</i> <i>Combating.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-12-03 Direvisi: 2023-01-15 Dipublikasi: 2024-02-06	Upaya penanggulangan perdagangan orang di Indonesia menjadi fokus utama pada evaluasi kebijakan dan kinerja pemerintah dalam melawan bentuk kejahatan ini. Perdagangan orang merupakan masalah serius yang melibatkan eksploitasi individu, terutama perempuan dan anak-anak, untuk tujuan komersial seperti prostitusi, kerja paksa, dan eksploitasi seksual. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi perdagangan orang, tetapi efektivitasnya perlu dievaluasi secara kritis. Jurnal ini mencakup analisis mendalam terhadap perkembangan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan perdagangan orang. Penelitian ini juga mengkaji kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, mencakup aspek penegakan hukum, perlindungan korban, rehabilitasi, dan kerjasama internasional. Temuan dalam jurnal ini memiliki implikasi penting bagi perbaikan kebijakan dan tindakan pemerintah dalam penanggulangan perdagangan orang di Indonesia. Kesimpulannya, upaya penanggulangan perdagangan orang memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan pihak internasional untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam melindungi hak asasi manusia dan mengakhiri praktik kejam ini.
Kata kunci: <i>Kejahatan;</i> <i>Perdagangan Orang;</i> <i>Kinerja Pemerintah;</i> <i>Kebijakan;</i> <i>Penanggulangan.</i>	

I. PENDAHULUAN

Tak terpungkiri, era globalisasi tidak hanya berdampak positif bagi sebuah negara namun juga menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif. Salah satu dampak negatif dari munculnya sistem ini adalah maraknya human trafficking (perdagangan orang), sebuah kegiatan bisnis ilegal yang mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan. Diperlukan upaya berkesinambungan dan kerja sama dari semua unsur untuk mengatasi permasalahan perdagangan orang ini (Marlia, 2012). Perdagangan orang adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia yang paling meresahkan dan memprihatinkan dalam era globalisasi ini. Dalam

praktiknya, perdagangan orang mencakup eksploitasi individu untuk tujuan komersial, termasuk prostitusi, kerja paksa, eksploitasi seksual, dan pekerjaan berbahaya lainnya. Fenomena ini tidak hanya menghancurkan nyawa dan masa depan korban yang terjebak, tetapi juga merusak moralitas dan martabat manusia serta menghambat pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia dan sebagai negara kepulauan yang strategis, tidak luput dari masalah perdagangan orang.

Keberadaan perdagangan orang di Indonesia telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah,

lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk mengeluarkan kebijakan dan mengintensifkan upaya penegakan hukum. Namun, penting untuk mengevaluasi sejauh mana upaya tersebut telah berhasil dan sejauh mana kebijakan pemerintah telah efektif dalam menanggulangi perdagangan orang. Tinjauan ini tidak hanya penting untuk memahami perkembangan saat ini dalam upaya penanggulangan perdagangan orang, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kebijakan dan kinerja pemerintah dalam melawan kejahatan ini.

Penelitian ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam beberapa aspek. Pertama, secara sosial dan kemanusiaan, penelitian ini membawa dampak signifikan karena berfokus pada upaya penanggulangan perdagangan orang, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian ini dapat berpotensi memberikan perlindungan lebih baik kepada individu yang rentan menjadi korban perdagangan orang di Indonesia dan mengurangi tingkat eksploitasi serta penderitaan yang terkait dengan kejahatan ini. Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks kebijakan publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan serta kinerja pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan perdagangan orang. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan yang telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam upaya melawan perdagangan orang, termasuk regulasi, program perlindungan, dan langkah-langkah kebijakan lainnya yang relevan. Selanjutnya, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut telah diimplementasikan dengan efektif dalam praktiknya, dan mencari tahu kendala atau hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kinerja pemerintah dalam penanggulangan perdagangan orang, termasuk upaya penegakan hukum, perlindungan korban, rehabilitasi dan koordinasi antarlembaga terkait.

II. METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian mengenai Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan sifat dari pendekatan kualitatif yang mengatakan bahwa realitas bersifat ganda, rumit, dinamis, dan kebenaran realitas bersifat dinamis. (Mulyana, 2013:147). Selain itu, penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15).

Menurut Jane Richie (dalam Moleong, 2012) penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang objek yang diteliti. Dalam perkembangannya, penelitian kualitatif juga mendapat keraguan dari para peneliti positivis. Menurut mereka penelitian kualitatif tidak bisa dikategorikan penelitian ilmiah, karena tidak memiliki data yang akurat. Namun para peneliti post-positivis yang meluruskan pandangan tersebut. Penelitian kualitatif dengan paradigma post-positivis melihat sebuah realitas dengan lebih dalam, tidak hanya di permukaan sebuah realitas tersebut melainkan hingga pemaknaan dan motif realitas itu. Selain itu, meneliti fenomena tersebut tidak bisa perbagian, karena realitas sifatnya adalah suatu bagian yang utuh (holistik).

Untuk menjawab keraguan tersebut, maka penelitian kualitatif menggunakan dasar pendekatan alamiah pada setiap pengumpulan data dan pengolahan data yang didapat dari sumber informasi. David Williams (1995) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia

Analisis kebijakan dalam penanggulangan perdagangan orang di Indonesia adalah langkah penting untuk memahami efektivitas upaya pemerintah dalam melawan kejahatan ini. Dalam konteks ini, analisis mencakup pemahaman mendalam tentang kebijakan-kebijakan yang telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia, termasuk regulasi, program perlindungan, dan langkah-langkah kebijakan lainnya yang relevan. Selain itu,

analisis juga mencakup evaluasi sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut telah diimplementasikan dengan efektif dalam praktiknya. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, dan apakah sumber daya yang cukup telah dialokasikan untuk mendukung implementasi tersebut. Selanjutnya, analisis ini juga melibatkan identifikasi kendala atau hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kebijakan, baik dalam hal peraturan yang rumit, kurangnya koordinasi antarlembaga, atau faktor-faktor lain yang dapat menghambat efektivitas kebijakan penanggulangan perdagangan orang di Indonesia. Analisis kebijakan ini menjadi landasan penting untuk dapat merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat membantu pemerintah Indonesia meningkatkan kebijakan dan praktik mereka dalam upaya penanggulangan perdagangan orang.

Analisis kebijakan juga memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan kemanusiaan dari kebijakan tersebut. Apakah kebijakan-kebijakan ini telah menghasilkan peningkatan dalam perlindungan hak asasi manusia, pengurangan jumlah korban, dan penghukuman pelaku kejahatan dan bagaimana dampak ekonomi terkait dengan upaya penanggulangan perdagangan orang. Ini melibatkan evaluasi dampak positif dan negatif dari kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan. Analisis kebijakan juga mengidentifikasi kendala dan hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kebijakan. Ini bisa termasuk masalah koordinasi antarlembaga, kurangnya sumber daya, peraturan yang rumit, atau bahkan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu. Memahami kendala-kendala ini penting untuk merumuskan rekomendasi yang realistis dan berkelanjutan bagi pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kebijakan dan praktik mereka dalam penanggulangan perdagangan orang. Dengan demikian, analisis kebijakan menjadi tonggak penting dalam memahami dinamika upaya penanggulangan perdagangan orang di Indonesia dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat ditingkatkan.

Evaluasi implementasi kebijakan dalam konteks upaya penanggulangan perdagangan orang di Indonesia merupakan elemen kunci dalam pemahaman tentang sejauh mana upaya pemerintah dalam melawan per-

dagangan orang telah berhasil di lapangan. Dalam evaluasi ini, perlu diperhatikan sejumlah aspek kunci. Pertama, bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah diadopsi sebenarnya diterapkan dan dijalankan oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Hal ini mencakup pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan, langkah-langkah konkret yang diambil untuk menerapkan kebijakan, dan apakah ada panduan yang jelas bagi para pelaksana. Selanjutnya, penting untuk menilai sejauh mana implementasi ini sesuai dengan tujuan awal kebijakan. Dalam konteks penanggulangan perdagangan orang, hal ini mencakup evaluasi apakah tindakan penegakan hukum efektif dalam menghukum pelaku perdagangan orang dan memberikan perlindungan kepada korban. Evaluasi implementasi kebijakan juga harus memerhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pelaksanaan, seperti alokasi sumber daya yang memadai, pelatihan bagi petugas penegak hukum, dan kerjasama antarlembaga yang efektif. Evaluasi implementasi kebijakan dalam penanggulangan perdagangan orang di Indonesia adalah langkah yang esensial untuk mengukur efektivitas upaya pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah kejahatan ini. Hasil evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dan area perbaikan yang memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan langkah-langkah penanggulangan perdagangan orang di masa depan.

Implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan orang di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya, baik dalam hal dana maupun personel. Terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dengan efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa ada alokasi yang memadai untuk mendukung langkah-langkah penanggulangan perdagangan orang, termasuk untuk penyelidikan, penegakan hukum, bantuan kepada korban, serta program pendidikan dan kesadaran publik. Permasalahan koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan signifikan. Upaya penanggulangan perdagangan orang melibatkan berbagai lembaga pemerintah, mulai dari kepolisian hingga dinas sosial, imigrasi, dan kejaksaan. Koordinasi yang kurang efektif antarlembaga dapat mengakibatkan tumpang tindih dalam upaya

penanganan kasus dan kurangnya respons yang cepat terhadap kejahatan ini.

Selain itu, perdagangan orang sering melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dengan baik, yang dapat menyulitkan upaya penegakan hukum. Tantangan ini mencakup identifikasi dan pemantauan kelompok-kelompok kriminal ini, yang sering beroperasi lintas batas dan menggunakan teknik penyamaran yang canggih. Penegakan hukum juga dapat menghadapi ancaman terhadap petugas penegak hukum dan saksi, yang dapat menghambat proses penyelidikan dan pengadilan. Selanjutnya, isu budaya dan sosial juga menjadi tantangan dalam penanggulangan perdagangan orang. Beberapa komunitas mungkin menghadapi tekanan budaya atau sosial yang membuat sulit bagi korban untuk melaporkan kasus perdagangan orang atau mencari bantuan. Hal ini memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan sosial dalam upaya penanggulangan perdagangan orang. Masalah ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran tentang perdagangan orang juga merupakan hambatan. Banyak orang mungkin tidak memahami tanda-tanda perdagangan orang atau tidak menyadari bahwa mereka atau orang di sekitar mereka dapat menjadi korban. Pendidikan dan kampanye yang lebih luas diperlukan untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu ini.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah perdagangan orang. Diantaranya adalah dengan KUHP baru dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu UU Cipta Kerja) yang diharapkan akan secara positif mendukung usaha dan perlindungan tenaga kerja. Menteri Hukum dan Hak asasi manusia (Menkumham), Yasonna, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia khususnya pada Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia (Kemenkumham) berkomitmen untuk dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dalam bentuk reformasi hukum untuk meningkatkan keamanan. Diantaranya reformasi di bidang keimigrasian (Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham, 2023).

Kemudian terkait penanganan pada maraknya kasus perdagangan orang, Menkumham yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Andap Budhi Revianto, Dirjen Imigrasi Silmy Karim, Dirjen Pemasayarakatan Reynhard P. Silitonga dan

Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri Linggawaty Hakim pada forum The 8th Bali Process Ministerial Conference yang diselenggarakan di Adelaide, Australia pada 9 Februari 2023 menyampaikan bahwa ke depannya Indonesia akan mengadvokasi Bali Process yang lebih responsif dan proaktif terhadap tren perdagangan orang serta mendorong peningkatan kolaborasi oleh semua anggota, pengamat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Bali Process, atau lengkapnya Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, merupakan forum kerja sama untuk membahas isu perdagangan orang, penyelundupan manusia dan kejahatan terkait lainnya di kawasan. Organisasi multilateral ini beranggotakan 49 negara dan organisasi internasional, serta 18 negara observer dan 9 organisasi internasional.

Tantangan dalam mengidentifikasi korban juga merupakan masalah tersendiri, terutama ketika mereka terjebak dalam situasi yang sangat terkendali oleh pelaku. Mereka mungkin tidak memiliki akses ke bantuan atau pelaporan yang aman, dan perlindungan korban menjadi lebih rumit dalam situasi semacam ini. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik, termasuk perbaikan dalam sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang rentan. Kerjasama yang erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang kompleks ini dalam implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan orang di Indonesia.

B. Teori Kriminologi yang Berkaitan dengan Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang oleh Pemerintah

Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) merupakan teori yang penulis kaitkan dengan pembahasan pada jurnal ini. Teori Kontrol Sosial berpendapat bahwa individu akan cenderung melakukan tindakan kriminal jika tidak ada kontrol sosial yang efektif. Pemerintah dapat menilai efektivitas sistem penegakan hukum dan juga pencegahan kriminalitas dalam upaya penanggulangan perdagangan orang. Tinjauan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah dapat mendasarkan pada sejauh mana kontrol sosial telah diterapkan dan berfungsi dalam mencegah tindakan perdagangan orang.

Teori Kontrol Sosial adalah salah satu teori kriminologi yang memfokuskan perhatian pada faktor-faktor yang mengontrol perilaku kriminal. Dalam konteks upaya penanggulangan perdagangan orang, teori ini memiliki relevansi penting karena membantu dalam memahami peran kontrol sosial dalam mencegah tindakan kriminal, seperti perdagangan orang. Berikut beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam konteks teori ini:

1. Kontrol Internal dan Eksternal: Teori Kontrol Sosial membedakan antara kontrol internal (self-control) dan kontrol eksternal (social control). Kontrol internal mencakup nilai-nilai, moral, dan etika individu yang memotivasi mereka untuk tidak terlibat dalam tindakan kriminal. Di sisi lain, kontrol eksternal mencakup sistem hukum, norma sosial, dan penegakan hukum yang mengontrol perilaku kriminal. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem kontrol eksternal beroperasi secara efektif dalam mencegah dan menghukum pelaku perdagangan orang.
2. Norma Sosial dan Stigma: Kontrol sosial juga berkaitan dengan norma-norma sosial dan stigmatisasi. Pemerintah dapat mempromosikan norma-norma yang menentang perdagangan orang dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi tindakan tersebut. Dengan menciptakan stigma terhadap perdagangan orang, individu mungkin lebih cenderung melaporkan tindakan tersebut dan tidak terlibat di dalamnya.
3. Penegakan Hukum: Dalam kerangka teori kontrol sosial, efektivitas penegakan hukum adalah faktor kunci dalam mencegah dan menindak tindakan kriminal. Pemerintah harus menilai apakah sistem penegakan hukum bekerja dengan baik dalam mendeteksi, menuntut, dan juga menghukum pelaku perdagangan orang. Ini termasuk upaya penegakan hukum untuk melindungi korban dan memberikan mereka dukungan.
4. Sanksi: Dalam teori kontrol sosial, ada penekanan pada sanksi sebagai alat untuk mencegah tindakan kriminal. Pemerintah perlu memastikan bahwa hukuman bagi pelaku perdagangan orang cukup keras dan memiliki efek deterrensi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa korban diberikan perlindungan dan

bantuan setelah tindakan perdagangan orang terungkap.

5. Pencegahan: Selain penindakan, pencegahan adalah elemen penting dalam teori kontrol sosial. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya pencegahan perdagangan orang. Ini mencakup edukasi, pelatihan, dan juga program-program yang mengurangi faktor risiko yang memungkinkan terjadinya perdagangan orang.

C. Kinerja Pemerintah Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang

Penegakan hukum memainkan peran sentral dalam kinerja pemerintah dalam penanggulangan perdagangan orang di Indonesia. Efektivitas penegakan hukum merupakan ukuran kunci dalam menilai sejauh mana pemerintah dapat mengatasi tantangan serius ini. Dalam konteks ini, penegakan hukum mencakup sejumlah aspek penting. Pertama, penting untuk memastikan bahwa kasus-kasus perdagangan orang diidentifikasi, diselidiki, dan diadili secara adil dan tegas. Ini melibatkan pelatihan yang memadai bagi petugas penegak hukum untuk mengenali tanda-tanda perdagangan orang, mengumpulkan bukti yang kuat, dan memproses kasus dengan cermat melalui sistem peradilan. Penegakan hukum juga harus fokus pada penghukuman yang setimpal terhadap pelaku. Ini mencakup memastikan bahwa pelaku perdagangan orang menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk hukuman penjara yang sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Hal ini dapat menjadi deterren yang kuat bagi potensi pelaku kejahatan ini.

Selain penegakan hukum di tingkat nasional, kerjasama internasional juga menjadi penting dalam penanggulangan perdagangan orang. Perdagangan orang sering melibatkan jaringan transnasional, dan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam pengungkapan dan penuntasan kasus menjadi sangat relevan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa ada kerangka hukum yang memadai untuk mendukung penegakan hukum dalam upaya penanggulangan perdagangan orang. Ini mencakup revisi atau pembuatan undang-undang yang sesuai dengan perkembangan terbaru dalam perdagangan orang dan kebijakan nasional serta internasional yang relevan.

Dalam konteks penanggulangan perdagangan orang, maka aspek perlindungan korban juga merupakan fokus penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Perlindungan korban adalah aspek kritis dalam kinerja pemerintah dalam penanggulangan perdagangan orang di Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban yang terjebak dalam perdagangan orang diberikan bantuan yang memadai dan perlindungan sesuai dengan hak asasi mereka. Hal ini mencakup sejumlah langkah penting. Pertama, penting untuk memberikan bantuan medis dan psikologis kepada korban untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka. Korban juga membutuhkan tempat yang aman untuk tinggal, yang dapat melindungi mereka dari ancaman pelaku perdagangan orang.

Perlindungan korban juga mencakup upaya untuk melindungi identitas mereka dan mencegah pengeksposan terhadap risiko lebih lanjut. Korban yang bekerjasama dengan penegakan hukum harus dilindungi dari ancaman atau balas dendam oleh pelaku atau jaringan perdagangan orang. Selanjutnya, penting untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi yang memadai kepada korban. Ini mencakup pelatihan dan pendidikan agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan mandiri, serta bantuan dalam mencari pekerjaan yang aman dan layak. Mendukung korban dalam proses pemulihan ini adalah kunci dalam membantu mereka membangun kembali kehidupan yang stabil setelah pengalaman traumatis perdagangan orang.

Perlindungan korban juga melibatkan peran dalam proses hukum terhadap pelaku. Korban sering menjadi saksi kunci dalam pengadilan, dan memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka selama proses hukum adalah tanggung jawab pemerintah. Perlindungan korban adalah salah satu elemen inti dalam kinerja pemerintah dalam penanggulangan perdagangan orang. Ini mencerminkan komitmen untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia serta memberikan kesempatan bagi korban untuk memulihkan diri dan membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Dalam upaya penanggulangan perdagangan orang yang efektif, perlindungan korban harus menjadi prioritas utama.

Pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya TPPO. Salah satunya dengan

menerbitkan Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk memperkuat pencegahan TPPO dan mempertegas hukuman pada pelaku, maka pemerintah menyiapkan beleid pendukung, yakni Rencana Perpres Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RPerpres RAN PP TPPO) (Kemenko PMK, 2022).

Tujuan penyusunan RPerpres RAN TPPO adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanganan korban, serta penindakan terhadap pelaku TPPO. Adanya RPerpres RAN PP TPPO guna menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu. Dari Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah.

Untuk memaksimalkan penanggulangan perdagangan orang, maka kerjasama internasional juga menjadi salah satu aspek yang perlu dilaksanakan pemerintahan dalam salah satu bentuk kebijakannya. Kerjasama internasional memainkan peran yang sangat penting dalam kinerja pemerintah Indonesia dalam penanggulangan perdagangan orang. Perdagangan orang sering melibatkan jaringan yang lintas batas, dengan pelaku yang beroperasi di berbagai negara. Oleh karena itu, upaya penanggulangan perdagangan orang tidak dapat terbatas pada batas-batas nasional. Kerjasama internasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang lintas negara ini.

Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks, kerjasama internasional menjadi semakin penting dalam penanggulangan perdagangan orang. Upaya bersama dengan negara-negara lain, organisasi internasional, dan mitra internasional adalah cara yang efektif untuk menghadapi permasalahan ini secara holistik dan melintasi batas-batas negara. Kinerja pemerintah Indonesia dalam penanggulangan perdagangan orang dapat ditingkatkan melalui kolaborasi yang erat dengan komunitas internasional. Selain itu, kerjasama internasional dapat membantu dalam menyusun peraturan yang lebih kuat

dan konsisten di tingkat global. Hal ini mencakup peningkatan harmonisasi hukum antarnegara, yang dapat mempermudah penuntasan pelaku yang melarikan diri atau melintasi batas. Dengan adanya kerangka kerja hukum yang seragam, penegakan hukum di berbagai negara dapat bekerja lebih efisien. Kerjasama juga membuka pintu bagi pendanaan dan sumber daya tambahan untuk mendukung upaya penanggulangan perdagangan orang. Banyak lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah yang dapat memberikan bantuan finansial atau teknis kepada negara-negara yang memerlukan. Ini dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, mendukung korban, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan orang.

Berbagai upaya telah coba dilakukan oleh pemerintah, NGO, dan badan internasional untuk menemukan solusi nyata dan tahan lama dalam mengatasi permasalahan perdagangan orang di Indonesia. Salah satu program dalam mengatasi masalah ini adalah Empower, program yang didesain untuk mengutamakan kapasitas pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan korban tindak pidana perdagangan orang. Upaya bilateral juga terus digalakkan pemerintah guna mengatasi masalah ini, seperti yang telah dilakukan dengan pemerintah Australia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Saudi Arabia. Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga telah membuktikan kesungguhan upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang.

Dalam konteks global yang terus berubah, kerjasama internasional juga memungkinkan negara-negara untuk bersama-sama merumuskan respons yang lebih adaptif terhadap tren dan tantangan baru dalam perdagangan orang, seperti peran teknologi dalam eksploitasi manusia. Kolaborasi ini memungkinkan negara-negara untuk lebih responsif terhadap perubahan dalam dinamika perdagangan orang yang terus berkembang. Dengan demikian, kerjasama internasional bukan hanya tentang mengatasi masalah lintas negara, tetapi juga tentang mengoptimalkan sumber daya dan upaya untuk mencapai tujuan bersama dalam penanggulangan perdagangan orang. Ini memerlukan komitmen yang berkelanjutan dari negara-negara, organisasi internasional,

dan mitra internasional untuk bersama-sama melawan kejahatan serius ini.

D. Dampak dan Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Orang

Analisis dampak kebijakan penanggulangan perdagangan orang adalah langkah kritis untuk mengukur efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam melawan kejahatan ini. Analisis ini mencakup sejumlah aspek yang penting dalam pemahaman dampak kebijakan. Pertama, dampak kebijakan dapat diukur dari perspektif pengurangan tingkat perdagangan orang. Ini mencakup pengukuran jumlah kasus yang dilaporkan dan diidentifikasi, penghukuman terhadap pelaku, serta pengurangan korban yang terjebak dalam perdagangan orang. Peningkatan dalam statistik ini dapat menunjukkan efektivitas kebijakan. Dampak kebijakan juga harus dinilai dari perspektif perlindungan korban. Hal ini mencakup mengukur sejauh mana korban mendapatkan akses ke bantuan, perawatan medis, rehabilitasi, dan dukungan psikososial. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai sesuai dengan hak asasi mereka dan dapat memulihkan diri dari pengalaman traumatis.

Analisis dampak kebijakan juga mencakup evaluasi ekonomi. Ini mencakup perhitungan biaya ekonomi dari perdagangan orang, seperti biaya pelayanan korban, biaya penegakan hukum, dan dampak ekonomi yang lebih luas pada masyarakat. Menilai dampak ekonomi dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi manfaat ekonomi dari upaya penanggulangan perdagangan orang. Analisis dampak juga harus melibatkan perspektif jangka panjang. Dampak kebijakan mungkin tidak selalu terlihat dalam waktu singkat, tetapi dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Evaluasi jangka panjang dapat mengungkapkan perubahan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang lebih luas yang mungkin terjadi sebagai akibat dari upaya penanggulangan perdagangan orang.

Dalam melihat dampak kebijakan penanggulangan perdagangan orang, penting untuk mengambil pendekatan yang holistik dan juga menyeluruh. Ini memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memahami implikasi yang lebih luas dari kebijakan tersebut dan melakukan perubahan

yang diperlukan untuk dapat memperbaiki efektivitas langkah-langkah penanggulangan perdagangan orang di masa depan. Secara keseluruhan, analisis dampak kebijakan adalah alat penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan perdagangan orang. Ini memungkinkan untuk mengukur keberhasilan kebijakan yang telah diadopsi, mengidentifikasi area perbaikan yang mungkin, dan merancang strategi yang lebih efektif dalam melawan kejahatan ini secara berkelanjutan.

Upaya meminimalisasi kasus perdagangan orang nampaknya belum membuahkan hasil yang maksimal, karena implementasi Perda perdagangan orang No. 3 Tahun 2008 belum mampu mengatasi seluruh perdagangan orang sejak awal. Bentuk perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang meningkat dari tahun ke tahun, tidak ada kelemahan dalam aturan penertiban perdagangan orang, karena aturan atau instruksi yang berbeda yang diberikan ke daerah tingkat pusat sudah optimal. Masalahnya adalah urutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah (Mubarrod).

Kerjasama internasional dalam penanggulangan perdagangan orang juga memiliki dampak yang lebih luas dalam konteks global. Salah satu pengaruh yang sangat penting adalah kemampuan untuk menekan pergerakan jaringan perdagangan orang lintas batas. Karena pelaku seringkali beroperasi melalui wilayah yang berbeda, kerjasama internasional memungkinkan negara-negara untuk bersatu dalam mengidentifikasi, mengungkap, dan menghentikan kegiatan ilegal ini di berbagai lokasi geografis. Ini dapat mengurangi ruang gerak pelaku perdagangan orang dan membuat bisnis ilegal ini lebih sulit untuk berkembang. Pertama, kerjasama internasional memungkinkan pertukaran informasi dan intelijen yang lebih efektif antara negara-negara. Ini memungkinkan negara-negara untuk dapat lebih cepat mengidentifikasi jaringan perdagangan orang, mengungkap kasus-kasus, dan menghukum pelaku. Kerjasama ini juga memungkinkan negara-negara untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dalam menghadapi perdagangan orang dan mengembangkan praktik terbaik.

Selanjutnya, kerjasama internasional dapat membantu dalam peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum. Negara-negara dapat berbagi pelatihan, sumber daya teknis, dan juga dukungan dalam memperkuat kemampuan penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum. Ini dapat meningkatkan efektivitas dalam menindak pelaku dan melindungi korban. Kerjasama internasional juga memengaruhi perkembangan kebijakan global dalam penanggulangan perdagangan orang. Konvensi-konvensi internasional, seperti Protokol Palermo yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjadi landasan bagi kerja sama antarnegara dalam mengatasi perdagangan orang. Negara-negara yang berkomitmen untuk mematuhi konvensi ini berkewajiban untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan juga praktik-praktik penanggulangan perdagangan orang yang efektif. Ini menciptakan norma internasional yang mendukung penanggulangan perdagangan orang. Pengaruh positif lainnya dari kerjasama internasional adalah penguatan diplomasi dan hubungan antarnegara. Ketika negara-negara bekerja sama dalam isu-isu yang berkaitan dengan penanggulangan perdagangan orang, ini menciptakan fondasi untuk kerjasama dalam isu-isu lain yang relevan. Ini dapat memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama antara negara-negara.

Kendala dan hambatan bagi pemerintah dalam upaya kebijakan penanggulangan perdagangan orang di Indonesia adalah serangkaian tantangan yang kompleks dan beragam. Pertama-tama, masalah sumber daya menjadi kendala utama. Terbatasnya anggaran, personil, dan fasilitas untuk melaksanakan program penanggulangan perdagangan orang dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam merespons kasus-kasus yang semakin rumit. Ini mencakup keterbatasan dalam pelatihan petugas penegak hukum, fasilitas rehabilitasi bagi korban, serta dukungan medis dan psikososial yang memadai. Tantangan hukum dan administratif seringkali menghambat upaya penanggulangan perdagangan orang. Proses hukum yang rumit, terutama dalam kasus-kasus lintas batas, dapat memperlambat penuntasan pelaku perdagangan orang. Kurangnya harmonisasi antara undang-undang dan peraturan di berbagai daerah atau tingkat pemerintahan juga dapat menciptakan

hambatan dalam koordinasi upaya penanggulangan.

Dalam konteks geografis yang luas dan pulau-pulau yang tersebar di Indonesia, koordinasi antarwilayah juga dapat menjadi kendala. Penanggulangan perdagangan orang memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta antar-lembaga di berbagai tingkat pemerintahan. Koordinasi ini seringkali memerlukan sumber daya dan waktu yang cukup. Aspek migrasi dan mobilitas penduduk juga merupakan kendala. Indonesia adalah negara dengan tingkat migrasi yang tinggi, dan ini dapat menciptakan peluang bagi pelaku perdagangan orang untuk memanfaatkan situasi ini. Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap pergerakan orang, terutama di wilayah-wilayah perbatasan, untuk mencegah eksploitasi dan perdagangan orang lintas batas.

Terakhir, ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran tentang perdagangan orang juga merupakan hambatan. Banyak orang mungkin tidak memahami tanda-tanda perdagangan orang atau tidak menyadari bahwa mereka atau orang di sekitar mereka dapat menjadi korban. Pendidikan dan kampanye yang lebih luas diperlukan untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu ini. Dalam menghadapi kendala dan hambatan ini, pemerintah harus mengadopsi pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Ini mencakup alokasi sumber daya yang lebih besar untuk penanggulangan perdagangan orang, perbaikan dalam sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang rentan, serta kerja sama yang erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil.

E. Interpretasi Hasil Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Perdagangan Orang

Persoalan perdagangan orang menyangkut human security pada sebuah negara, tetapi tentunya juga mempengaruhi negara lainnya karena melewati batas negara yang akan mengancam human security di negara lainnya. Karakter persoalan ini menjadi dasar diangkatnya persoalan perdagangan orang dalam Protokol Palermo, sebuah kerangka hukum internasional yang menetapkan standar penanganan dan pemenuhan hak korban trafficking yaitu United Nations Trafficking Protocol, terlebih lagi mengingat

bahwa keamanan manusia yang bersifat universal (Apriani, 2017).

Implikasi terhadap kebijakan dan praktik pemerintah dalam penanggulangan perdagangan orang adalah sangat signifikan dan memerlukan respons yang kuat. Pertama, pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang telah ada dan mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan. Ini mencakup perubahan atau penyempurnaan undang-undang dan peraturan yang mengatur perdagangan orang, serta peningkatan dalam alokasi anggaran untuk program penanggulangan. Praktik pemerintah dalam penegakan hukum dan penyelidikan juga perlu diperbarui. Pemerintah harus memastikan bahwa petugas penegak hukum menerima pelatihan yang memadai dan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengungkap jaringan perdagangan orang. Hal ini juga mencakup perbaikan dalam koordinasi antarlembaga dan antarpemerintah untuk meningkatkan efisiensi dalam menuntaskan kasus-kasus perdagangan orang.

Perlindungan korban harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan praktik pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa korban diberikan akses yang memadai ke layanan kesehatan, rehabilitasi, dan dukungan psikososial. Upaya untuk melindungi identitas korban dan mencegah pengeksposan terhadap risiko lebih lanjut juga harus ditingkatkan. Kebijakan dan juga praktik pemerintah juga perlu mengintegrasikan pendekatan pencegahan yang lebih efektif. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan orang, pelatihan untuk mengenali tanda-tanda perdagangan orang, dan langkah-langkah pencegahan yang ditujukan kepada kelompok yang rentan.

Kerjasama internasional harus terus diperkuat dan ditingkatkan. Pemerintah Indonesia perlu menjaga hubungan yang kuat dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional dalam upaya bersama melawan perdagangan orang. Ini mencakup pertukaran informasi, dukungan dalam penegakan hukum lintas negara, dan kolaborasi dalam mengatasi aspek-aspek internasional dari perdagangan orang. Dengan respons yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap implikasi ini, pemerintah dapat memperkuat kebijakan dan praktik mereka dalam penanggulangan perdagangan orang, yang pada gilirannya

akan meningkatkan efektivitas dalam melawan kejahatan ini dan melindungi hak asasi manusia.

Implikasi terhadap kebijakan dan praktik pemerintah juga melibatkan pendekatan preventif yang harus diterapkan secara berkelanjutan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mendorong perdagangan orang, seperti ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya pendidikan, atau ketidakstabilan sosial. Upaya pencegahan ini mencakup pembangunan ekonomi yang inklusif, perbaikan akses pendidikan, dan peningkatan kondisi sosial yang mendorong pengurangan faktor risiko.

Dalam menghadapi implikasi ini, pemerintah perlu memiliki visi jangka panjang yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan untuk melawan perdagangan orang. Ini akan memerlukan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak terkait dan perbaikan terus-menerus dalam kebijakan dan praktik penanggulangan perdagangan orang. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pemerintah dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman.

Di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis nasional melalui penyusunan dan penetapan: 1) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002; 2) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002; dan 3) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002.

Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Pada 19 April 2007 telah disahkan kebijakan nasional anti Trafficking melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) setelah hampir 10 tahun penantian sejak rancangan kebijakan tersebut dirumuskan. Kebijakan nasional tersebut kemudian

diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak oleh Pemerintah Daerah di wilayahnya masing-masing di seluruh Indonesia (Apriani, 2017).

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam penanggulangan perdagangan orang, sejumlah rekomendasi dapat diambil sebagai langkah-langkah konkrit. Sebagai contoh, pemerintah perlu memperkuat kerja sama antarlembaga dalam hal penegakan hukum dan penuntasan pelaku perdagangan orang. Ini mencakup pelatihan yang berkualitas tinggi untuk petugas penegak hukum, serta perbaikan dalam koordinasi dan pertukaran informasi antarlembaga. Peningkatan kinerja pemerintah dalam penanggulangan perdagangan orang memerlukan tindakan konkret yang dapat memperkuat kebijakan dan praktik mereka.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pada jurnal ini telah menyajikan sebuah tinjauan mendalam terhadap upaya penanggulangan perdagangan orang di Indonesia, dengan fokus pada evaluasi kebijakan dan kinerja pemerintah dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini. Berbagai aspek telah dianalisis, termasuk upaya penegakan hukum, perlindungan korban, pencegahan, kerjasama internasional, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Pada jurnal ini menyoroti beberapa pencapaian penting dalam upaya penanggulangan perdagangan orang di Indonesia, seperti pengesahan berbagai undang-undang yang mendukung penuntasan pelaku, peningkatan kesadaran masyarakat, dan upaya pemberdayaan korban. Namun, juga telah diidentifikasi sejumlah kendala dan hambatan yang menghadang, termasuk keterbatasan sumber daya, tantangan hukum dan administratif, serta masalah budaya dan sosial. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi perdagangan orang, yang melibatkan pertukaran informasi, dukungan lintas batas, dan harmonisasi kebijakan global. Kerjasama ini memainkan peran penting dalam menekan pergerakan jaringan perdagangan orang lintas negara. Rekomendasi juga telah diajukan untuk memperkuat kinerja pemerintah, termasuk penyempurnaan kebijakan dan undang-undang, penguatan sistem hukum, peningkatan dukungan untuk

korban, pendidikan dan kesadaran masyarakat yang lebih baik, serta pemberantasan korupsi. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan mitra internasional untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penanggulangan perdagangan orang.

Dengan komitmen yang kuat dan tindakan konkret, diharapkan pemerintah Indonesia dapat terus memperbaiki kinerja mereka dalam melawan perdagangan orang, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman. Penanggulangan perdagangan orang adalah pekerjaan bersama yang memerlukan kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak untuk mencapai tujuan yang mulia ini.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Apriani, R. D. (2017). KEBIJAKAN NASIONAL ANTI-TRAFFICKING DALAM MIGRASI INTERNASIONAL. *Politica* Vol. 8 No. 2, 146.
- Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham. (2023, Februari 9). Menkumham Dorong Upaya Kolektif untuk Mengatasi Perdagangan Orang. Retrieved from <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/menkumham-dorong-upaya-kolektif-untuk-mengatasi-perdagangan-orang#:~:text=Pemerintah%20Indonesia%20sendiri%20telah%20mengeluarkan,usaha%20dan%20perlindungan%20tenaga%20kerja.>
- Creswell, J. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc: California
- Kemenko PMK. (2022, Juli 27). Cegah Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Persiapkan RPerpres RAN PP TTPO. Retrieved from [kemenkopmk.go.id: https://www.kemenkopmk.go.id/cegah-tindak-pidana-perdagangan-orang-pemerintah-persiapkan-rperpres-ran-pp-ttpo](https://www.kemenkopmk.go.id/cegah-tindak-pidana-perdagangan-orang-pemerintah-persiapkan-rperpres-ran-pp-ttpo)
- Marlia. (2012, September 25). Prof. Denny Indrayana, "Upaya Memerangi Perdagangan Orang Harus Libatkan Banyak Pihak". Retrieved from [https://www.unpad.ac.id/: https://www.unpad.ac.id/2012/09/prof-denny-indrayana-upaya-memerangi-perdagangan-orang-harus-libatkan-banyak-pihak/](https://www.unpad.ac.id/https://www.unpad.ac.id/2012/09/prof-denny-indrayana-upaya-memerangi-perdagangan-orang-harus-libatkan-banyak-pihak/)
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mubarrod, S. S. (n.d.). STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT TAHUN 2018-2022 DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2008. *Jurnal Communitarian* Vol. 4 No. 2 E-ISSN 2686-0589, 671.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.